

MEMOBILISASI KETERLIBATAN PERUSAHAAN DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Bagaimana perusahaan mendukung rencana aksi pembangunan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR ISI

Penulis	04	Tentang ringkasan ini
Nur Maliki Arifiandi	05	Temuan utama
Helen Finlay	06	Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta
Stephen Drury	10	Gambaran umum kabupaten
Terima kasih kepada	12	Upaya korporasi dalam mendukung komitmen kabupaten Siak dan kabupaten Pelalawan
Pietro Bertazzi	22	Sebuah jalan menuju pembangunan berkelanjutan di kabupaten-kabupaten di Indonesia
Morgan Gillespy		
Sareh Forouzesh		
Rini Setiawati		
Lingkar Temu Kabupaten		
Lestari (LTKL)		
Proforest		

Pemberitahuan Penting

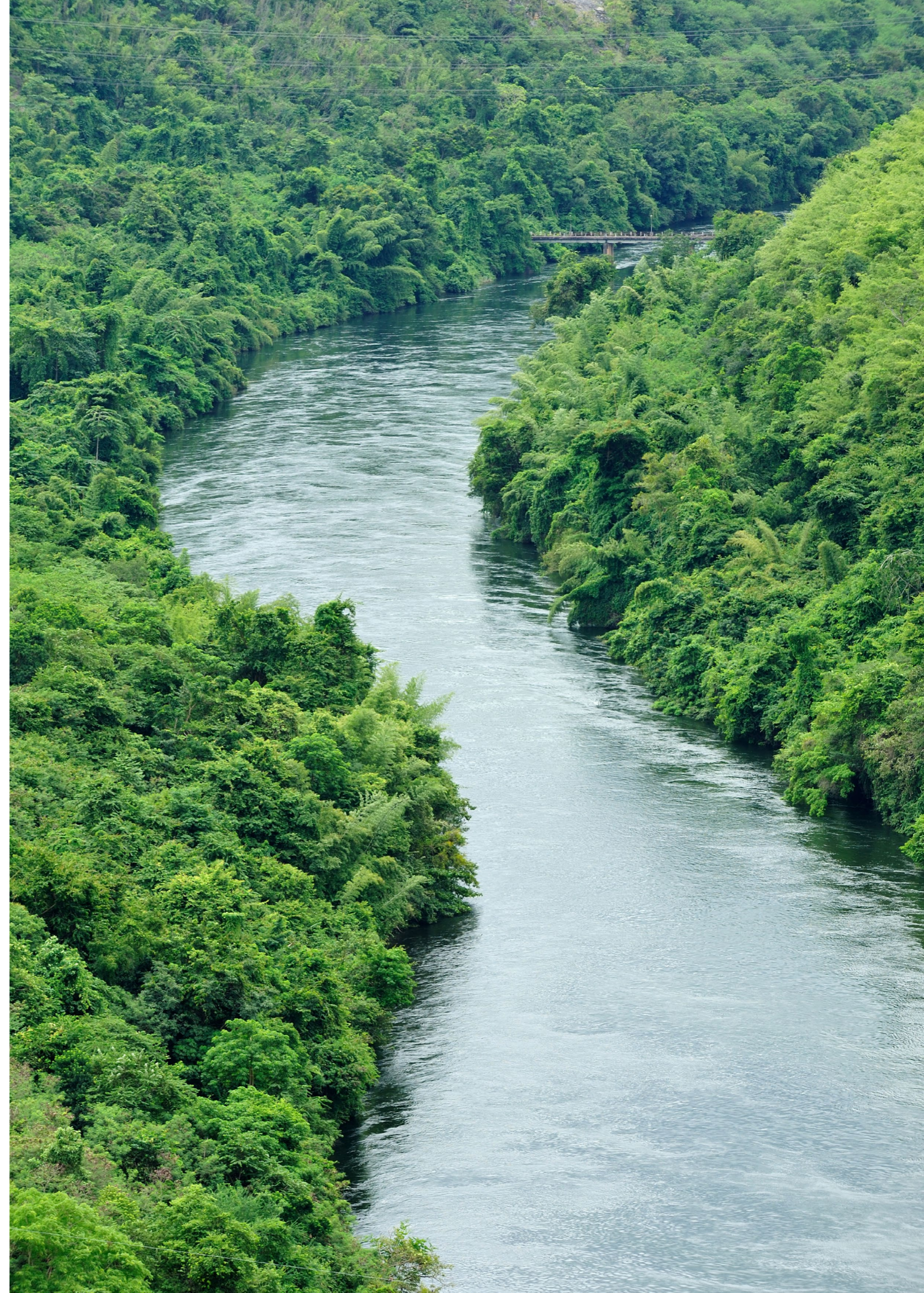
Isi dalam laporan ini dapat digunakan oleh siapapun dengan mencantumkan CDP sebagai sumber informasi. Namun hak tersebut tidak termasuk untuk mengemas ulang serta menjual data apapun yang dilaporkan kepada CDP maupun para penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Jika anda bermaksud untuk mengemas ulang maupun menjual salah satu isi dalam laporan ini, anda harus mendapatkan izin tertulis dari CDP terlebih dahulu.

CDP menyusun dan menganalisa data dalam laporan ini berdasarkan tanggapan atas permintaan informasi CDP 2019. Tidak ada representasi ataupun jaminan (tertulis maupun tak tertulis) dari CDP atas keakuratan ataupun kelengkapan informasi dan opini dalam laporan ini. Anda tidak boleh serta merta mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam publikasi ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak profesional. Sepanjang diizinkan oleh peraturan perundangan, CDP tidak menerima atau menanggung kewajiban, tanggung jawab, atau kewajiban apapun atas segala konsekuensi perbuatan anda maupun pihak lain, atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dengan mengandalkan informasi dalam laporan ini, atau untuk segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi pada laporan ini. Segala informasi dan pandangan yang diungkapkan oleh CDP dalam laporan ini berdasarkan pada penilaian saat laporan ini dibuat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan dikarenakan faktor ekonomi, politik, industri dan alasan khusus dari perusahaan. Komentar dari para kontributor yang dituangkan dalam laporan ini merupakan pandangan pribadi dari masing-masing penulis; pernyataan tersebut bukan merupakan dukungan dari mereka.

CDP, perusahaan atau perusahaan anggota afliasinya, atau pemegang saham, anggota, mitra, kepala, direktur, pejabat dan/atau karyawan, mungkin memiliki sekuritas pada perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di beberapa negara dan juga tidak cocok untuk semua jenis investor; nilai sekuritas dan pendapatan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan/atau dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.

CDP merujuk kepada CDP North America, Inc, sebuah organisasi nirlaba dengan status yayasan sosial 501(c)3 di Amerika Serikat dan CDP Worldwide, dengan nomor pendaftaran yayasan sosial n 1122330 dan nomor pendaftaran perusahaan terbatas dengan jaminan dan terdaftar di Inggris dengan nomor 05013650.

© 2020 CDP. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang



TENTANG RINGKASAN INI

Ringkasan kebijakan ini merupakan hasil analisa kami yang mengungkapkan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan melalui kuesioner hutan CDP (CDP Forest Questionnaire) yang selaras dengan rencana pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah di Indonesia. Dokumen ini ditujukan bagi para pembuat kebijakan di tingkat kabupaten di Indonesia untuk membantu menjelaskan peran sektor korporasi dalam menghentikan deforestasi dan mengembangkan rantai pasok komoditas yang berkelanjutan untuk mendorong dan meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh para perusahaan pada seluruh rantai nilai mereka diakui sebagai unsur penting bagi negara untuk memenuhi *Nationally Determined Contributions* (NDC), target deforestasi, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dan koordinasi yang lebih baik antara perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemerintah untuk tujuan keberlanjutan bersama. Pendekatan Yurisdiksi (*Jurisdictional Approaches*) muncul sebagai upaya yang menjanjikan untuk menyatukan para pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan dan tindakan positif jangka panjang. Namun demikian, sebagai konsep yang baru lahir, pengetahuan akan dampak dan penerapan pendekatan tersebut masih terbatas.

Ulasan singkat ini melihat peta jalan tingkat kabupaten di Indonesia, yang dirancang untuk menerapkan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten (*Sustainable Development Regencies*) dan meningkatkan rantai pasok minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Dokumen ini membahas pentingnya perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan bersama serta menyajikan studi kasus dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung rencana aksi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Kami mengenalkan konsep "Pendekatan Yurisdiksi", menguraikan tantangan yang perlu diatasi dan mengusulkan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di tingkat kabupaten, untuk mendorong integrasi pemangku kepentingan perusahaan yang lebih besar.

Apa keselarasan yang ada antara rencana keberlanjutan tingkat kabupaten dan tindakan perusahaan?

CDP melakukan analisis terhadap 17 kelompok perusahaan yang memproduksi dan menghasilkan komoditas berbasis hutan dari Kabupaten Siak dan Pelalawan, yang dilakukan melalui Kuesioner Hutan CDP Tahun 2019, untuk mengukur kontribusi sektor korporasi dalam mendukung elemen-elemen kunci dalam peta jalan tingkat kabupaten.

TEMUAN UTAMA



Perusahaan lebih cenderung terlibat langsung dengan **forum multi-pihak** daripada langsung dengan pemerintah atau para pembuat kebijakan, untuk mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan mereka.



Mayoritas produsen dan perusahaan telah berkomitmen untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok mereka, namun komitmen terhadap **restorasi lansekap** dan pengurangan degradasi hutan masih kurang.



Perusahaan telah selaras dengan rencana aksi nasional dan rencana aksi kabupaten tentang komitmen "**tanpa pembakaran**".



Kegiatan restorasi gambut perlu ditingkatkan dan dipublikasikan untuk menunjukkan dukungan terhadap target pemerintah.



Tingkat **ketertelusuran** saat ini belum cukup untuk menjamin pasokan komoditas yang berkelanjutan.



Perusahaan telah secara aktif terlibat dengan **pekebun swadaya dan pemasok langsung**, utamanya melalui pelatihan-pelatihan dan lokakarya.



Tingkat pengungkapan yang rendah terkait komitmen, tindakan dan dampak dari para pemilik konsesi yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sehingga mengakibatkan terbatasnya visibilitas di lapangan.

PENTINGNYA KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH DENGAN SEKTOR SWASTA

Melestarikan hutan dunia yang ada saat ini sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Hutan Indonesia secara umum dianggap signifikan dalam menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dikarenakan luasan hutan, keanekaragaman hayati, dan kapasitas penyimpanan karbonnya¹. Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga dan Conservation International mengakuinya sebagai salah satu dari 17 negara megadiverse di dunia. Hutan Indonesia memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga dan 12% mamalia dunia, nomor dua setelah Brasil². Mata pencaharian lebih dari sepertiga populasi penduduk Indonesia bergantung pada jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan tersebut³.

Hutan Indonesia telah terancam selama beberapa dekade. 26,8 juta hektar tutupan pohon hilang pada periode 2001-2019, yang setara dengan 10,9Gt emisi CO₂⁴. Angka tersebut setara dengan sepertiga emisi dunia pada tahun 2018⁵. Perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri telah diidentifikasi sebagai dua pemicu deforestasi utama—dalam kurun waktu 2001-2015 masing-masing sekitar 1,6 juta hektar dan 1,5 juta hektar telah dikonsversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri⁶. Laju deforestasi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk moratorium atas izin hutan alam primer dan lahan gambut serta penurunan harga minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan laju deforestasi sebesar 30% dibandingkan dengan laju deforestasi tahunan rata-rata antara tahun 2001 dan 2016⁷. Namun, dengan adanya pandemi virus korona baru-baru ini telah menyebabkan peningkatan deforestasi, hal ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya aparat penegakan hukum. Pada Maret 2020 terjadi peningkatan laju deforestasi sebesar 130% dibandingkan dengan laju deforestasi rata-rata pada periode yang sama di tahun 2017-2019⁸.

Sebagai bagian dari kontribusi Indonesia terhadap *Paris Climate Agreement*, yang dirinci dalam *National Determined Contribution* (NDC), yang disampaikan pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada tahun

2030 dengan bantuan internasional (29% dengan upaya sendiri). Sektor Kehutanan sendiri diharapkan berkontribusi sebesar 60% dari target pengurangan emisi tersebut⁹. Pada tahun 2020, sebagai bagian dari perjanjian REDD+, Pemerintah Norwegia melakukan pembayaran pertama sebesar USD 56,15 juta kepada Pemerintah Indonesia karena berhasil mengurangi laju deforestasi pada tahun 2016-2017, yang setara dengan 11,23 juta ton CO₂¹⁰.

Pengakuan pemerintah atas pengaruh sektor korporasi dan keterlibatan mereka dalam perencanaan penerapannya akan menjadi penting, jika perusahaan ingin memenuhi komitmen publik tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk merumuskan kebijakan perencanaan dan penggunaan lahan, dalam penerapannya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi isu deforestasi dan isu terkait lainnya¹¹. Aktivitas ekonomi perusahaan biasanya bergerak dalam lingkup yurisdiksi; alokasi sumber daya yang mereka lakukan dapat membentuk ekonomi lansekap dan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan; selain itu juga daya beli perusahaan berpengaruh langsung terhadap bagaimana komoditas diproduksi dan dipasok¹². Selanjutnya, kontak yang dilakukan oleh perusahaan dengan pemasok dan pekebun swadaya, menciptakan peluang untuk mengembangkan keahlian teknis terkait praktik-praktik berkelanjutan. Disamping itu, juga dapat meningkatkan kapasitas dan investasi dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi lokal seperti pelanggaran hak asasi manusia.



Tanda awal keterlibatan pihak pemerintah dengan sektor korporasi

Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) dipimpin oleh Kementerian Pertanian dengan dukungan aktif dari UNDP Indonesia, bertujuan untuk mengkoordinasikan semua sektor yang berfokus pada produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. FoKSBI telah memiliki tiga kabupaten yang berpartisipasi aktif, termasuk Kabupaten Pelalawan (lihat halaman 11). FoKSBI sangat aktif mendukung implementasi Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, sebuah panduan berskala luas untuk produksi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia¹³.

Pendekatan yurisdiksi, di mana deforestasi dan masalah lingkungan dan masalah sosial lainnya ditangani di tingkat yurisdiksi, muncul sebagai metode baru bagi perusahaan dan sektor publik untuk bekerja sama, bukan secara mandiri, untuk mewujudkan komitmen keberlanjutan bersama. Bentuk pendekatan lansekap ini menyatukan semua aktor yang terkait, dalam batas administratif politik untuk bersama-sama mengembangkan tujuan, menyelaraskan kegiatan, dan berbagi peran dalam pemantauan dan verifikasi¹⁴. Deforestasi, isu lingkungan dan tantangan sosial lainnya sangatlah kompleks dan mempunyai pemicu yang cenderung berada di luar wilayah

operasi perusahaan. Oleh karena itu, sangatlah penting agar para pemangku kepentingan yang aktif di tingkat lansekap dipertemukan bersama. Komitmen dan dukungan politis dari para pemimpin yurisdiksi, dalam hal ini adalah Bupati, merupakan unsur yang penting dalam pendekatan ini, yaitu dengan menyediakan kerangka kebijakan, integrasi prinsip dan tujuan keberlanjutan dalam rencana pembangunan serta kapasitas penegakannya¹⁵. Pemerintah daerah mempunyai peluang untuk terlibat lebih jauh, yaitu dengan memberikan wawasan sosial, ekonomi dan lingkungan yang terperinci dalam yurisdiksi mereka.

Pendekatan Yurisdiksi memberikan sejumlah peluang, antara lain^{16, 17}:

- ▼ **Mengatasi masalah lintas sektor dan dalam skala besar** – menangani deforestasi melalui rantai pasok perusahaan atau komoditas tertentu seringkali menimbulkan dampak yang tidak merata di lapangan. Pendekatan yurisdiksi memberikan kesempatan untuk menggabungkan upaya-upaya positif atas produksi dan konservasi yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil dengan skala yang lebih besar
- ▼ **Inklusivitas dan demokratisasi dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan** – merupakan prakarsa perwakilan multistakeholder, dimana tujuan dirumuskan bersama dengan para pelaku utama dalam satu yurisdiksi, menyediakan ruang untuk mengikutsertakan para pekebun swadaya. Pekebun swadaya cenderung tidak berpartisipasi dalam sertifikasi karena kendala biaya dan kapasitas, namun melalui keikutsertaan mereka dalam inisiatif lintas sektor tersebut dapat mengarah pada penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang lebih besar.
- ▼ **Menghubungkan tujuan penggunaan lahan** – misalnya tujuan konservasi hutan di sekitar area jasa lingkungan seperti pengaturan air, diakui sebagai pendukung peningkatan produksi komoditas.
- ▼ **Mengatasi kebocoran dalam suatu yurisdiksi** – keputusan perencanaan tata guna lahan yang terkoordinasi dan pemantauan yurisdiksi mengurangi kemungkinan deforestasi.
- ▼ **Menyelaraskan sumber daya dan investasi** – keterlibatan lintas sektor mendorong investasi yang cerdas, terkoordinasi dan tidak bertentangan untuk memperoleh dampak yang maksimal.
- ▼ **Ketahanan terhadap perubahan politik** – akuntabilitas diantara para pemangku kepentingan dengan pengawasan yang memadai dapat mengurangi kemungkinan inisiatif tersebut ditinggalkan karena perubahan politik, serta dapat membantu menstabilkan pasokan komoditas yang berkelanjutan.
- ▼ **Peningkatan ketertelusuran** – dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan dalam lansekap yang masuk kedalam rantai pasok, dapat mengurangi risiko mengambil pasokan dari sumber yang tidak bertanggung jawab¹⁸.
- ▼ **Mengurangi risiko regulasi bagi perusahaan** – karena partisipasi pemerintah merupakan unsur utama dalam pendekatan yurisdiksi, perusahaan dapat lebih menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang akan diterapkan di masa mendatang.
- ▼ **Menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi keterlibatan perusahaan-perusahaan yang proaktif** – metode yurisdiksi, dimana terdapat dukungan pemerintah, memberikan kesempatan kepada pemilik konsesi untuk menyelaraskan kegiatan keberlanjutan mereka¹⁹.

Terlepas dari peluang yang dimiliki oleh pendekatan ini, terdapat keterbatasan keterlibatan dari para perusahaan, yang lebih memilih kegiatan keberlanjutan yang dapat memberikan hasil cepat dan mudah diukur. Untuk mengukur kegiatan yang bukan merupakan kewenangan langsung perusahaan, akan menjadi rumit dan mahal, terutama masalah multi aspek yang kompleks seperti deforestasi, sehingga sulit untuk melakukan justifikasi atas pengeluaran biaya²⁰. Sebagai pendekatan yang baru lahir, dan membutuhkan komitmen yang lebih lama, terdapat beberapa kisah sukses yang penerapannya belum

dimobilisasi. Selain itu, untuk menyatukan perusahaan dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan tujuan dan rencana aksi jangka panjang, akan memerlukan kompromi dan negosiasi²¹. Untuk memulai pendekatan ini, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Pemerintah kabupaten, dengan adanya kebijakan desentralisasi, mengemban tanggung jawab yang lebih besar atas tata kelola hutan dan lahan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung atas keikutsertaan sektor korporasi.

Implementasi NDC Nasional dapat diperkuat dengan kolaborasi diantara pemerintah daerah

Pemerintah daerah diakui sebagai pemangku kepentingan utama dalam pencapaian target NDC Indonesia. Melalui Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), sebuah forum kolaborasi pemerintah kabupaten yang terdiri dari 12 kabupaten (9 anggota aktif dan 3 anggota tidak aktif), berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayahnya masing-masing²². Fokus area meliputi (i) perencanaan, kebijakan & peraturan, (ii) tata kelola para pemangku kepentingan, (iii) kesiapan untuk menarik dan mengelola insentif pada penggunaan lahan berkelanjutan, (iv) pengukuran & pelaporan kemajuan untuk menarik insentif, dan (v) komunikasi dan perluasan jangkauan untuk memperluas dukungan. Beberapa pemerintah kabupaten telah mengambil tindakan progresif dengan mengembangkan rencana aksi yang terinci dan terikat waktu, dalam rangka mendukung komitmen publik mereka, seperti contohnya adalah Kabupaten Siak (lihat halaman 11).



GAMBARAN UMUM KABUPATEN

Ringkasan ini terfokus pada dua kabupaten²³ di Provinsi Riau, Indonesia, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, untuk mengetahui lebih jauh tentang komitmen sektor korporasi serta kontribusi yang ada saat ini terhadap rencana pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten.

Riau merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan pada tahun 2019 menghasilkan 9 juta ton minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*)²⁴. Hampir 60% luas lahannya ditutupi oleh perkebunan, terutama kelapa sawit²⁵. Sumber kepemilikan produksi kelapa sawit terdiri dari gabungan antara perkebunan milik negara, perkebunan swasta dan pekebun swadaya²⁶. Pada tahun 2019, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak merupakan kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar pertama dan ketiga di Provinsi Riau, dengan total produksi secara berturut-turut sekitar 17,9% dan 14,7% dari total produksi di Provinsi Riau²⁷. Kelapa sawit terus menerus menjadi kontributor yang sangat signifikan terhadap pembangunan ekonomi di kedua kabupaten tersebut, tetapi juga tetap menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi. Pada tahun 2001-2019, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan secara berturut-turut kehilangan 58% dan 56% tutupan pohon dibandingkan dengan tahun 2000, yang secara langsung disebabkan oleh konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit²⁸.

Lebih dari 50% tutupan lahan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan adalah lahan gambut, yang terkenal dengan kerentanannya terhadap kebakaran²⁹. Lahan gambut di seluruh Indonesia diperkirakan menyimpan 28,1 gigaton CO₂, lebih dari setengah kemampuan seluruh hutan dataran tinggi di Indonesia dalam menyimpan CO₂³⁰. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebabkan oleh El Nino pada tahun 2015 telah menyebabkan sekitar 884 juta ton CO₂ terlepas ke udara pada bulan September dan Oktober³¹. Mengingat adanya perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di lahan gambut³², pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memitigasi dan mencegah terjadinya kebakaran

lahan gambut di masa mendatang, serta berkontribusi terhadap NDC Pemerintah Indonesia.

Mengingat skala relatif dari produksi komoditas berbasis hutan serta kerentanan lansekap di kabupaten-kabupaten ini menunjukkan pentingnya keterlibatan sektor korporasi dan masyarakat, serta penyelarasan dan pemantauan dalam yurisdiksi tersebut, apabila pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat ingin memenuhi komitmen keberlanjutan mereka.

Adanya insentif serta memfasilitasi keikutsertaan produsen dan perusahaan pembeli di kedua kabupaten tersebut merupakan langkah yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan kabupaten. Sejumlah inisiatif telah dilakukan oleh beberapa perusahaan, yang saat ini sedang berjalan adalah *The Siak-Pelalawan Production Landscape Program* (SPLP), yang merupakan koalisi delapan perusahaan konsumen minyak kelapa sawit (Cargill, Danone, Golden Agri Resources, L'Oreal, Musim Mas, Nestle, PepsiCo dan Unilever), difasilitasi oleh *Consortium of Resource Experts* (CORE), yang bekerja sama dalam program-program di tingkat yurisdiksi untuk membangun rantai pasok kelapa sawit yang berkelanjutan³³. Inisiatif lain yang dilakukan adalah Koalisi Privat Sektor untuk Siak Hijau (KPSHH) yang dibentuk pada tahun 2020 untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah dengan pihak swasta serta keterlibatan LSM dengan pihak swasta di Kabupaten Siak, untuk mencapai target bebas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021³⁴. Penekanan dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, termasuk mendukung inisiatif kabupaten dengan menyelaraskan komitmen korporasi dengan target pembangunan berkelanjutan kabupaten.



PepsiCo, Inc, bersama dengan enam perusahaan lainnya telah mendesain program lansekap kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan lansekap yang berkelanjutan di kedua kabupaten tersebut yang memproduksi minyak kelapa sawit yang bebas deforestasi dan eksploitasi, selain itu juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kawasan konservasi. Program ini merupakan bagian dari sumber berkelanjutan dan keterlacakan dari PepsiCo, serta upaya untuk memperoleh 100% minyak kelapa sawit yang bersertifikasi pada tahun 2020.



Siak Regency

Kabupaten Siak yang merupakan salah satu pendiri Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), baru-baru ini mengemukakan niatnya untuk mengembangkan Kabupaten Siak Hijau (Siak Green Regency). Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018 yang mendukung target pembangunan berkelanjutan nasional telah diterjemahkan kedalam peta jalan yang detail oleh koalisi masyarakat sipil yang bernama Sedagho dengan konsultasi dari para pemangku kepentingan, yang menyediakan panduan, target dan indikator bagi pemerintah, sektor korporasi dan masyarakat³⁵.

Memiliki sasaran antara lain:

1. Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;
3. Pemanfaatan SDA tidak dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;
4. Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
5. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketanagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Pemilik konsesi telah diminta aksinya dalam kebijakan ini. Antara lain: berkomitmen *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE), Pengelolaan yang bertanggung jawab dan Praktik perkebunan yang baik; mendorong petani swadaya untuk mendapatkan sertifikat *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO); serta upaya sistematis untuk mencegah dan menangani kebakaran.

Pelalawan Regency

Meskipun bukan anggota LTKL, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerapkan kebijakan untuk mencegah deforestasi di Indonesia. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 601 Tahun 2017, sebagai bagian dari kegiatan percontohan FoKSBI dalam penerapan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).

Terdapat lima kegiatan dalam RAN KSB³⁶, yaitu:

1. Memperkuat data, koordinasi dan infrastruktur kelapa sawit;
2. Meningkatkan kapasitas pekebun swadaya;
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Tata kelola dan penanganan konflik; dan
5. Penerapan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pada saat ringkasan ini disusun, Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Pelalawan (RAN KSB versi kabupaten) masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan akan diterbitkan pada tahun 2020. Tujuan dari RAD KSB adalah untuk memberikan referensi bagi para pemangku kepentingan, peningkatan koordinasi para pemangku kepentingan serta pemantauan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan³⁷.



UPAYA KORPORASI DALAM Mendukung KOMITMEN KABUPATEN SIAK DAN KABUPATEN PELALAWAN

Pada tahun 2019, sebanyak 543 perusahaan di seluruh dunia secara sukarela mengemukakan dampak, risiko dan peluang terkait hutan, dengan menggunakan kuesioner hutan CDP, yang memberikan informasi rinci kepada instansi pemerintah tentang komitmen dan kegiatan perusahaan yang memproduksi, memanfaatkan dan atau menjual komoditas berbasis hutan dalam yurisdiksi mereka.

Mitigasi dan pencegahan kebakaran

Untuk mengukur tingkat keselarasan dengan rencana kabupaten yang ada saat ini, kami menganalisa tanggapan secara berkelompok pada 17 perusahaan, 7 perusahaan produsen dan 10 perusahaan pembeli produk kayu dan produk kelapa sawit di dalam yurisdiksi, terhadap unsur-unsur kunci termasuk diantaranya mitigasi dan pencegahan kebakaran; komitmen terhadap NDPE, termasuk kebijakan tanpa bakar dan restorasi lahan gambut; keterlibatan pekebun swadaya; dan ketertelusuran.

Dalam analisa tersebut, kami mendefinisikan "Produsen" sebagai perusahaan pemilik konsesi yang memproduksi produk kelapa sawit, atau pulp dan kertas. Sementara itu, perusahaan pembeli diartikan sebagai industri hilir yaitu pedagang, produsen dan pengecer.

Peta Jalan Hijau Siak (Siak Green Roadmap) dan RAN KSB merupakan upaya sistematis untuk mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di sekitar wilayah konsesi. Sejalan dengan RAN KSB, semua perusahaan dan mayoritas perusahaan (9 dari 10) yang memasok dari Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan memiliki komitmen untuk tidak membuka lahan dengan pembakaran maupun tebang habis.

Terlepas dari risiko kebakaran dan kontribusi terhadap penambahan emisi yang sangat tinggi di Provinsi Riau, hanya 3 perusahaan produsen dan tidak ada satupun pembeli yang mengidentifikasi kebakaran sebagai penyebab risiko utama di wilayah kerja mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penerapan, sehingga diperlukan keterlibatan perusahaan untuk memverifikasi kebijakan dan upaya-upaya terkait pencegahan dan mitigasi kebakaran.



Golden Agri-Resources (GAR) telah menerapkan Kebijakan Tanpa Bakar sejak tahun 1997. Pembasahan lahan gambut yang dilakukan dengan membangun kolam dan sungai merupakan upaya untuk mengurangi kebakaran. Selain itu, sebagai bagian dari program Desa Makmur peduli Api (DMPA) yang diluncurkan di tahun 2016, GAR bekerja sama dengan 32 desa-desa rawan kebakaran untuk berkolaborasi dalam pencegahan kebakaran. Warga desa dilatih untuk memadamkan api dengan cepat, edukasi tentang bahaya kebakaran dan mendorong untuk mengeksplorasi mengenai metodologi pembukaan lahan selain menggunakan api. Berdasarkan informasi dari GAR, program ini telah berhasil mengurangi titik panas dan titik api sebesar kurang lebih 80-90%.



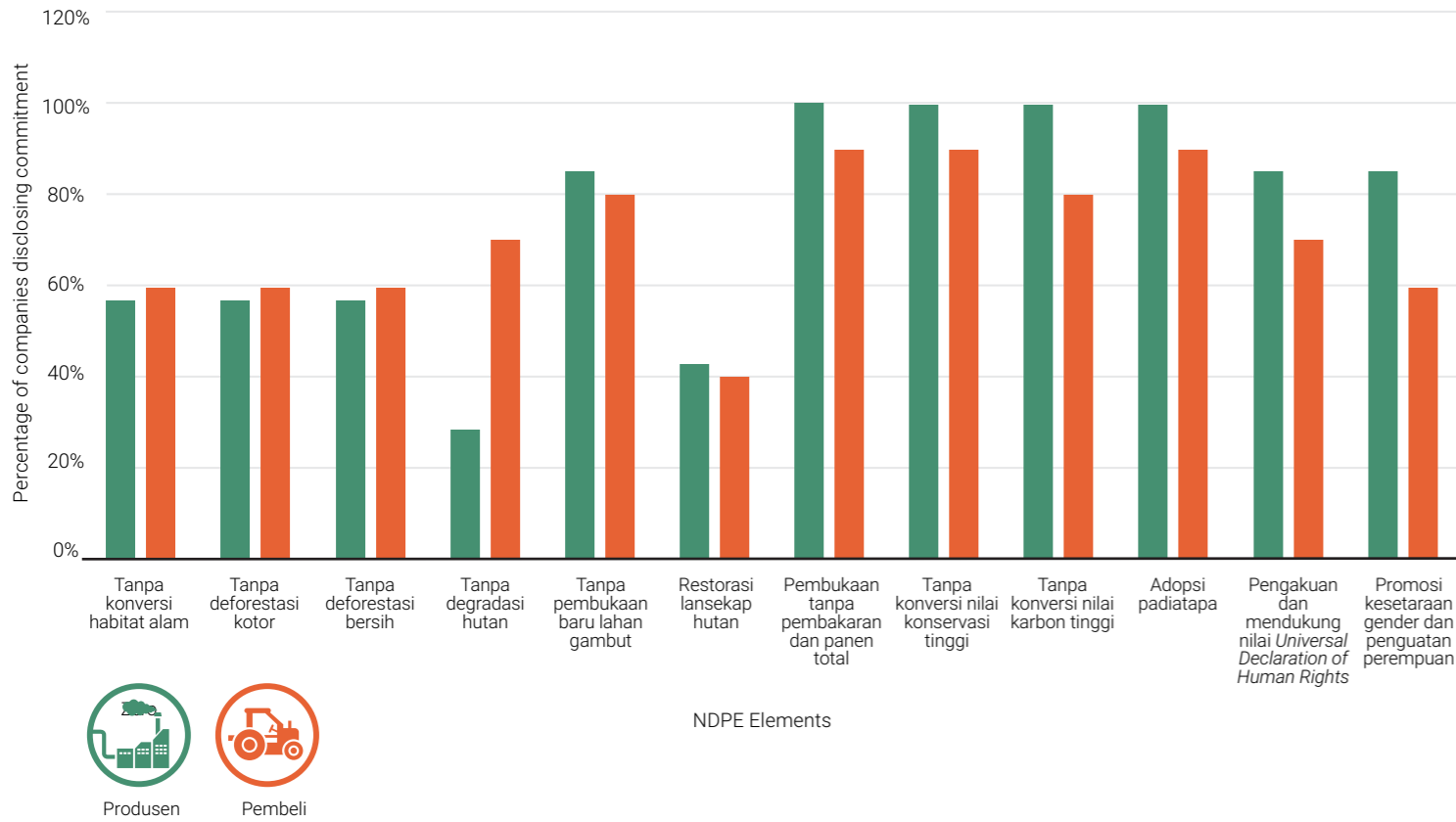
Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat and No Exploitation/NDPE)

Peta Jalan Hijau Siak menghimbau para perusahaan untuk mengadopsi dan menerapkan komitmen NDPE. Kuesioner hutan CDP menerapkan perusahaan untuk menginformasikan upaya-upaya yang yang diakui dalam NDPE seperti: a) kebijakan keberlanjutan perusahaan; dan b) komitmen publik.

Mayoritas perusahaan produsen di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan (6 dari 7 perusahaan) dan perusahaan pembeli mempunyai kebijakan keberlanjutan

untuk menghilangkan deforestasi dan atau konversi dari rantai pasok mereka. Namun demikian, kebijakan untuk menghilangkan degradasi hutan tersebut masih sangat kurang, hanya 2 dari 7 perusahaan produsen dibandingkan dengan perusahaan pembeli dimana 7 dari 10 telah memiliki kebijakan tersebut. Kurangnya fokus kegiatan pada penanganan degradasi tercermin pada komitmen perusahaan (Gambar 1). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), yang merupakan unsur utama dalam RAN KSB.

Gambar 1. Unsur Komitmen NDPE dalam Kuesioner 2019 yang diajukan kepada perusahaan



- ▶ Dengan pengecualian *Asia Pulp and Paper*, semua perusahaan produsen dan mayoritas perusahaan pembeli telah mengungkapkan komitmen publik untuk tidak membuka areal baru di lahan gambut³⁸. Hal ini merupakan indikator yang positif bahwa perusahaan mempunyai niat untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lahan gambut; RAN KSB, dan Peta Jalan Hijau Siak, untuk tidak menerbitkan izin baru di kawasan lindung gambut, kubah gambut, area dengan Nilai Konservasi Tinggi, dan area dengan Stok Karbon Tinggi, serta menghentikan kegiatan di area konsesi yang ada saat ini.
- ▶ Baik perusahaan produsen maupun perusahaan pembeli memiliki komitmen yang tinggi terhadap Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa). Penerapan Padiatapa dapat mengurangi konflik atas lahan dan memfasilitasi tumbuhnya kepercayaan antara perusahaan dengan masyarakat yang terkena dampak oleh kawasan konsesi. Sejalan dengan tujuan Peta Jalan Hijau Siak tentang resolusi konflik dan kebakaran hutan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan setidaknya telah berkomitmen untuk menangani permasalahan tersebut di area konsesi mereka.
- ▶ Komitmen restorasi lansekap hutan sangat kurang, hanya 3 dari 7 perusahaan produsen dan 4 perusahaan pembeli yang memiliki komitmen tersebut. Baik RAN KSB maupun Peta Jalan Hijau Siak membahas pentingnya restorasi dalam meningkatkan upaya konservasi lansekap dan rehabilitasi lahan gambut. Perlindungan dan restorasi hutan yang terdegradasi dapat meningkatkan kapasitasnya dalam penyediaan jasa lingkungan dan menghasilkan kembali hasil hutan kayu dan bukan kayu. Karena hutan tanaman menyerap karbon lebih cepat daripada hutan primer, hutan tanaman menjadi unsur penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim³⁹. Kurangnya komitmen tersebut menunjukkan bahwa restorasi hutan bukan merupakan prioritas perusahaan, hal ini perlu ditangani dengan melakukan upaya restorasi dan diverifikasi melalui pemantauan secara berkala.





Wilmar telah menerapkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) sejak Desember 2013. Wilmar mengakui, agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif, keterlibatan perusahaan pemasok dan pekebun swadaya merupakan kunci utama. Untuk mengukur tingkat kepatuhan pemasok, Wilmar menerapkan dua program yaitu *the Aggregator Refinery Transformation* (ART) pada tahun 2014, dan *the Supplier Reporting Tool* (SRT) pada tahun 2017. ART menyediakan kerangka kerja kolaboratif bagi penyuling, pabrik dan pekebun untuk mengatasi kendala di lapangan. Penyuling mempunyai sistem bagi pekebun dan pabrik untuk melaporkan perkembangan atas target-target lingkungan, sosial dan ketertelusuran. Program ini juga mencakup penyaringan risiko untuk pabrik pemasok dan memiliki sistem penilaian verifikasi yang menilai pemenuhan sampel dari pabrik pemasok, yang dipilih berdasarkan kategori risiko sedang dan tinggi. Sebagai upaya untuk memperoleh pasokan yang 100% terverifikasi, SRT secara khusus diluncurkan untuk mengevaluasi kelompok berisiko rendah dengan menyediakan sistem pelaporan mandiri bagi pemasok untuk melaporkan pemenuhan kebijakan NDPE Wilmar.

Keterlibatan pekebun swadaya dengan pemasok

Semua perusahaan berkolaborasi dengan pekebun swadaya untuk mendorong dan mendukung penerapan praktik-praktik terbaik untuk menghilangkan atau mengurangi deforestasi dan degradasi hutan. Pada tahun 2019, bentuk kolaborasi berupa pelatihan kepada pekebun swadaya (4 dari 7 perusahaan). Mengingat bahwa sekitar 40% perkebunan di Indonesia dimiliki oleh pekebun swadaya, maka pekebun swadaya merupakan kelompok pemangku kepentingan utama yang harus dilibatkan⁴⁰. Namun, meskipun penting, hanya 2 perusahaan produsen dan 2 perusahaan pembeli yang memberikan dukungan pembiayaan untuk pekebun swadaya. Tanpa dukungan pembiayaan yang mencukupi, pekebun swadaya tidak dapat mengatasi kendala biaya untuk sertifikasi.

Semua perusahaan produsen dan perusahaan pembeli bekerja sama dengan pemasok langsung untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memasok bahan baku yang berkelanjutan. Keterlibatan pemasok merupakan kunci, terutama bagi perusahaan pembeli, karena pemasok dan juga pekebun swadaya yang dapat membuat perubahan pada proses produksi berkelanjutan di lapangan. Keterlibatan produsen maupun perusahaan pemasok mencakup lokakarya dan pelatihan (7 dari 7 dan 8 dari 10 secara berurutan). Aktivitas perusahaan produsen terpusat pada data seperti pemetaan rantai pasok, sementara perusahaan pembeli berfokus pada kegiatan promosi dengan para pemangku kepentingan serta mendorong sertifikasi.



Unilever telah berkomitmen untuk mendukung dan memberdayakan 25.000 pekebun swadaya di sejumlah lansekap prioritas pada tahun 2030. Komitmen tersebut juga termasuk sekurangnya 2000 pekebun swadaya yang bersertifikasi RSPO pada akhir tahun 2021, dengan jaminan bahwa Unilever akan membeli produk yang bersertifikat RSPO dari pekebun swadaya untuk mengurangi beban biaya. Di Provinsi Riau, Unilever telah bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit, PT Sumber Kencana Indo Palma untuk membangun Sekolah Lapang Kelapa Sawit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengoptimalkan produktivitas dan profitabilitas kelapa sawit, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi komitmen NDPE. Dari 4000 pekebun swadaya yang teridentifikasi, lebih dari 1800 telah dilatih dalam program tersebut.

Ketertelusuran

Semua produsen dan perusahaan pembeli memiliki sistem ketertelusuran⁴¹ untuk melacak dan memantau asal usul komoditas. Mayoritas produsen (6 dari 7) dan pembeli (6 dari 10) memiliki tingkat ketertelusuran sebesar 90% atau lebih, baik ketertelusuran ke pabrik maupun ke perkebunan.

Terdapat tingkat komitmen menengah untuk meningkatkan rendahnya tingkat ketertelusuran, terutama diantara para perusahaan pembeli. Dari seluruh produsen, 3 dari 7 setidaknya memiliki satu ketertelusuran aktif (2019 sampai saat ini) untuk mencapai target penelusuran 100% sampai ke pabrik atau perkebunan. Untuk perusahaan pembeli, 6 perusahaan menunjukkan sinyal positif bahwa mereka telah mengatasi buruknya sistem keterlacakan mereka.

Kompleksitas rantai pasok kelapa sawit, utamanya risiko tercampurnya pasokan dengan sejumlah produk yang tidak diketahui sumbernya. Hasil analisa menunjukkan bahwa perusahaan masih berjuang untuk melacak pasokan sampai ke tingkat perkebunan. Upaya penelusuran tersebut hanya dilakukan dalam wilayah kerja mereka dan tidak termasuk penelusuran pada pekebun swadaya, hal ini merupakan pun- cak dari gunung es dari permasalahan yang ada. Mengatasi ketertelusuran di tingkat kabupaten dengan memperpendek rantai pasok sehingga memudahkan untuk mengamati alur produksi, serta melibatkan pekebun swadaya kedalam inisiatif yurisdiksi, menjanjikan kejelasan atas sumber pasokan.



Fuji Oil Holdings Inc. menggunakan kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk minyak dan lemak, yang menempati sepertiga dari total penjualan (tahun anggaran 2018). Mereka menyadari peluang untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat atas produk kelapa sawit berkelanjutan, juga pentingnya mengamankan pasokan minyak kelapa sawit yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam rangka menerapkan Kebijakan Pengadaan Minyak Kelapa Sawit yang Bertanggungjawab (*Responsible Palm Oil Procurement Policy*), Fuji Oil Holdings Inc. mengupayakan 100% ketertelusuran sampai ke pabrik untuk semua minyak kelapa sawit yang mereka gunakan pada tahun 2020. Dari bulan Juli–Desember 2018, tingkat ketertelusuran sampai ke pabrik sebesar 99%, terjadi kenaikan sebesar 4% pada periode yang sama di tahun 2017. Mereka terus bermitra dengan LSM untuk meninjau pemasok yang mereka pilih; memahami kebutuhan dan perspektif pemasok; dan menyediakan alat untuk diagnosa mandiri.

Solusi berbasis Alam (Nature-based Solutions/NbS)

Berdasarkan studi CDP tentang Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solution/NbS), Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menerapkan setidaknya satu bentuk NbS dalam setiap aspek kegiatan mereka. NbS merupakan istilah umum untuk menggambarkan beragam pilihan berbasis ekosistem untuk memitigasi perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan ekosistem. NbS dipandang sebagai upaya yang hemat biaya untuk mengelola, melindungi dan memulihkan ekosistem untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia⁴².

Dari 17 perusahaan, sebanyak 71%, hampir 5 kali rata-rata global, telah menerapkan NbS. Seperti yang diharapkan, karena kedekatan dengan isu lingkungan, para perusahaan menerapkan inisiatif tersebut (5 dari 7 perusahaan). Mayoritas kegiatan yang dilakukan berupa dukungan untuk konservasi hutan (5 dari 10 perusahaan)

dan upaya konservasi hutan berbasis kawasan lindung. Hal tersebut berkaitan langsung dengan program RAN KSB dalam meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati melalui pendekatan lansekap dan tujuan Peta Jalan Hijau Siak untuk restorasi gambut dan rehabilitasi lansekap pasca kebakaran.

Meskipun hal tersebut merupakan contoh indikatif yang tidak spesifik untuk kegiatan Indonesia, hal ini merupakan pertanda yang menjanjikan bahwa perusahaan yang memiliki kewenangan atas tata guna dan pengelolaan lahan di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menerapkan NbS untuk mengatasi deforestasi di wilayah kerjanya. Diperlukan informasi yang lebih spesifik atas areal-areal yang terdampak oleh NbS yang diungkapkan oleh perusahaan dan pemantauan standar secara berkala, untuk menilai secara efektif kontribusi dari pendekatan tersebut pada peta jalan keberlanjutan pemerintah.

Gambar 2: Kegiatan Nature-based solutions di 2019 dalam grup perusahaan (tidak spesifik Indonesia)



Restorasi lahan gambut

Kuesioner Hutan CDP Tahun 2019 tidak secara spesifik menanyakan upaya restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, untuk memperoleh informasi terkait upaya restorasi lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan, kami mencari contoh nyata kegiatan tersebut dari penjelasan yang mereka berikan.

Saat ini hanya terdapat 3 dari 7 perusahaan pembeli yang melakukan kegiatan restorasi lahan gambut dalam wilayah kerja mereka. Mayoritas intervensi yang digunakan adalah Assisted Natural Regeneration (ANR) dan regenerasi alami.

Restorasi lahan gambut terdapat pada program konservasi lansekap dan pengurangan emisi di dalam RAN KSB, dan merupakan faktor kunci dalam Peta Jalan Hijau Siak. Mengingat luasnya areal lahan gambut beserta potensi serapan karbonnya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, penerapan kegiatan restorasi lahan gambut tersebut tersebut masih sangat rendah. Upaya-upaya restorasi lahan gambut perlu dikoordinasikan dan dikelola pada tingkat Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) untuk meningkatkan ketahanan lansekap gambut yang sangat rentan.



Sekitar 50% pemasok **Asia Pulp and Paper's** di Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berada di lahan gambut. Asia Pulp and Paper telah bekerja sama dengan para ahli untuk meningkatkan zonasi lahan dan menentukan area untuk perlindungan sumber air, daerah penyangga dan hutan produksi. Upaya tersebut secara langsung mendukung rencana strategis jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zonasi gambut (*the Peat Rezoning Plan*).



Keterlibatan para pemangku kepentingan dengan pemerintah

Meskipun para perusahaan mengkonfirmasi bahwa mereka berpartisipasi dalam penerapan kebijakan berkelanjutan, namun tidak ada satupun perusahaan yang terlibat langsung dengan pemerintah maupun para pembuat kebijakan. Bentuk partisipasi dengan pihak luar umumnya berupa kemitraan seperti dengan RSPO, LSM, dan forum-forum khusus komoditas (dilakukan oleh semua produsen; dan 9 dari 10 perusahaan pembeli).

Untuk pendekatan lansekap seperti Pendekatan Yurisdiksi untuk membawa penerapan positif secara luas, keterlibatan pemerintah menjadi kunci. Melihat mayoritas perusahaan terlibat dalam bentuk inisiatif dalam bentuk inisiatif multi-pihak merupakan hal yang menggembirakan⁴³, namun tanpa adanya dukungan atau keterlibatan pemerintah suatu inisiatif akan sangat terbatas.



Cargill melakukan Kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk membangun kebun pendidikan kelapa sawit pertama di Indonesia. "IPB-Cargill Kebun Pendidikan Kelapa Sawit" (IPB-Cargill Palm Oil Teaching Farm) akan memberikan pelatihan untuk pelajar mengenai teknik terbaru dalam manajemen produksi yang dapat menjadi acuan untuk penerapan standar RSPO dan ISPO. Cargill akan terus melanjutkan kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan juga berpartisipasi, antara lain, dalam kelompok kerja untuk hak asasi manusia, perdagangan dan ketertelusuran, dan klaim dan komunikasi di RSPO; the Consumer Goods Forum; dan dengan perusahaan lain untuk mengembangkan standar untuk pengelolaan gambut yang bertanggung jawab bagi petani.



Transparansi dan pengungkapan.

Platform pengungkapan sukarela kuesioner hutan CDP, bertujuan untuk mendukung perusahaan dalam transparansi dampak lingkungan perusahaan mereka, serta untuk memberikan kerangka kerja dan acuan dalam upaya meminimalkan deforestasi dalam rantai pasok mereka. Informasi yang diberikan dapat digunakan menunjukkan keselarasan dengan kebijakan dan rencana aksi

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, juga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan komitmen perusahaan serta sebagai kontribusi dan kepatuhan atas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Platform ini dapat digunakan sebagai tolok ukur yang sangat diperlukan dalam kewajiban pengungkapan dengan spesifikasi yang memadai dan cakupan yang lebih luas di masa mendatang (*lihat kotak dibawah*).

Transparansi baru saja diterapkan dalam kebijakan Pemerintah Indonesia

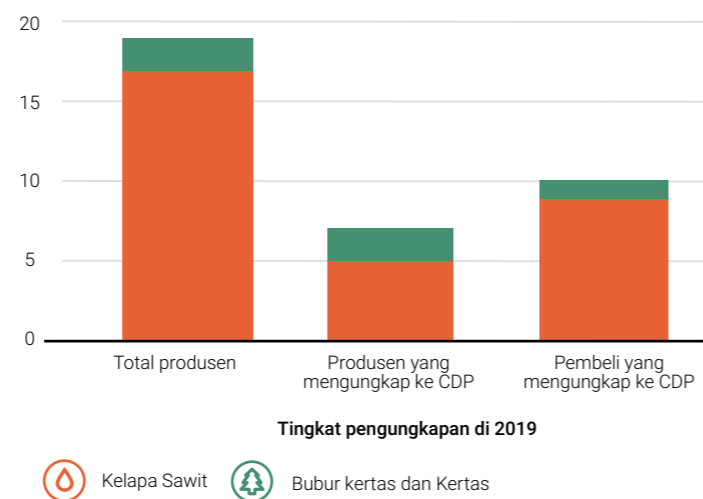
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, utamanya melalui peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. OJK mengamanatkan bahwa lembaga keuangan, emiten dan perusahaan publik Indonesia harus menyampaikan dan menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan yang memuat catatan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environment, Social, Governance/ESG*). Peraturan yang diterbitkan tahun 2017 tersebut telah diterapkan secara bertahap yang dimulai dengan bank komersial yang berada di bawah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha 3, 4 dan bank asing. Pada tahun 2020 akan diterapkan pada semua perusahaan publik dan akan diterapkan pada semua institusi terkait pada tahun 2025.

Perusahaan produsen dan pembeli di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan niat mereka untuk meningkatkan transparansi di wilayah kerja mereka. 5 dari 7 perusahaan produsen dan seluruh perusahaan pembeli (10 perusahaan) telah menetapkan komitmen mereka atas transparansi yaitu berupa pengungkapan kepada publik atas upaya penerapan keijakan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan mereka. Namun demikian, rendahnya tingkat pengungkapan diantara para produsen di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan menunjukkan masih perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan.

Sebagai langkah awal dalam menyatukan sektor korporasi dengan pemerintah, sangat penting bagi perusahaan untuk tetap berkomitmen terhadap transparansi dalam rantai nilai pasok mereka, serta memberikan informasi yang jelas tentang prosedur, target dan kemajuan, selaras dengan target pembangunan berkelanjutan kabupaten.

Gambar 3: Para produsen gagal dalam mengungkapkan dampak dan komitmen mereka melalui CDP

Dari 17 grup perusahaan kelapa sawit dan 8 perusahaan HTI, hanya 7 perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui CDP Forest Platform di tahun 2019.



Kuesioner Pengungkapan Tahun 2020

Di CDP, kami melakukan peninjauan tahunan atas kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari perusahaan untuk memastikan bahwa kuesioner yang kami gunakan masih relevan dengan industri dan standar-standar peraturan. Kuesioner Hutan Tahun 2020, mencakup pertanyaan-pertanyaan baru terkait kebijakan NDPE; komitmen terhadap Praktik Manajemen Terbaik di lahan gambut; lahan yang dialokasikan untuk perlindungan ekosistem; restorasi ekosistem dan penerapan ISPO. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan semakin meningkatkan keselarasan platform CDP dengan rencana aksi Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

SEBUAH JALAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN-KABUPATEN DI INDONESIA

Komitmen dan tindakan perusahaan terhadap keberlanjutan merupakan prasyarat untuk menghentikan deforestasi dan mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks di kabupaten-kabupaten di Indonesia. Kepemimpinan yang progresif di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan apresiasi mereka terhadap pengaruh perusahaan dengan mengikutsertakan perusahaan dalam rencana aksi pembangunan berkelanjutan. Kami telah menjabarkan tindakan dan komitmen perusahaan yang telah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat beberapa contoh yang menggembirakan atas kepemimpinan yang proaktif, namun kesenjangan dalam penerapannya masih tetap ada.

Rekomendasi kebijakan:

1 Peningkatan dialog dan keterlibatan sektor pemerintah dengan swasta



Karena peran mereka yang sangat unik dan saling melengkapi dalam menangani deforestasi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tingkat keterlibatan antara pemerintah kabupaten dengan perusahaan harus ditingkatkan. Hal ini akan membantu mencegah dampak yang tidak merata, duplikasi kegiatan, dan akan mempercepat upaya-upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Perusahaan produsen dan pembeli di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan komitmen mereka untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok mereka. Pemerintah kabupaten perlu memfasilitasi dialog antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mendorong keterlibatan publik yang lebih luas dan lebih baik atas isu-isu yang sejalan. Sebagai langkah awal, platform Pengungkapan CDP dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan keterlibatan perusahaan.

2 Memfasilitasi upaya korporasi yang lebih besar untuk target keberlanjutan bersama



Terlepas dari komitmen kelompok perusahaan, sebagian besar perusahaan tidak dapat menjamin bahwa rantai nilai mereka bebas deforestasi. Lebih lanjut, perusahaan perlu meningkatkan upaya restorasi lansekap dan gambut serta mengoptimalkan solusi berbasis alam (*Nature-based Solutions/NBS*), jika mereka ingin mendukung keberhasilan pencapaian program pemerintah di seluruh wilayah yurisdiksi. Untuk mendukung upaya perusahaan secara aktif, inisiatif tingkat kabupaten yang kolaboratif memerlukan target yang dibuat bersama secara jelas, penentuan peran, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan. Hal ini akan meningkatkan upaya koordinasi yang telah ada dan direncanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga akan meningkatkan kepemilikan atas tujuan bersama. Selanjutnya, pemerintah kabupaten didalam yurisdiksinya, dapat menangani permasalahan perusahaan dan membantu pelaporan perusahaan dengan menentukan parameter dan standar penilaian keberhasilan program pada tingkat yurisdiksi.



3 Menerapkan dan memantau komitmen dan peta jalan yang jelas menuju pembangunan berkelanjutan kabupaten dan memanfaatkan pengungkapan lingkungan melalui rantai pasok



- ▶ Peta Jalan Hijau Siak perlu diperkuat dengan mekanisme yang jelas serta tindakan-tindakan detail untuk diterapkan dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Terkait target dan peranan yang disusun bersama, diperlukan sistem pemantauan dan verifikasi untuk memperkuat keselarasan dan mendorong akuntabilitas dalam pencapaian tujuan bersama.
- ▶ Pengarusutamaan transparansi pada kegiatan rantai pasok perusahaan merupakan langkah penting untuk menunjukkan kontribusi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan tujuan global, selain itu juga dapat digunakan oleh pemerintah, investor dan LSM sebagai sarana untuk memantau dan pertanggungjawaban perusahaan. Meskipun peraturan OJK 51 Tahun 2017 merupakan upaya yang menjanjikan menuju arah yang lebih baik, diperlukan informasi dampak deforestasi yang lebih spesifik serta komitmen perusahaan untuk memberikan informasi yang rinci kepada yurisdiksi kabupaten. Pengarusutamaan pengungkapan oleh anak perusahaan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan di seluruh rantai nilai dan akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Agar hal ini dapat terjadi, diperlukan peraturan yang lebih baik untuk mendorong visibilitas yang lebih besar di seluruh rantai nilai serta mendorong integrasi masalah lingkungan kedalam operasional perusahaan pada tingkat yurisdiksi.

4 Mereplikasi peraturan kabupaten tentang pembangunan berkelanjutan di kabupaten lainnya



Komitmen pembangunan nasional berkelanjutan perlu diterjemahkan kedalam rencana kabupaten dengan batas waktu yang jelas, serta dengan panduan dan peta jalan yang jelas untuk kontribusi sektor korporasi. Untuk mendukung hal tersebut, kami mengusulkan untuk melakukan pembelajaran dan mereplikasi kebijakan yang telah ada, serta melakukan kegiatan percontohan sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Siak. Para pihak yang terkait di dalam yurisdiksi, termasuk perusahaan produsen dan pembeli perlu dilibatkan didalam diskusi sejak awal, untuk memastikan bahwa tujuan dibuat secara bersama serta untuk membangun dukungan dari mereka. Replikasi lintas kabupaten akan sangat penting untuk menghindari kebocoran, yaitu terjadinya perpindahan deforestasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, serta untuk menyelaraskan upaya-upaya di tingkat lansekap, dan juga untuk meningkatkan portofolio kabupaten itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- 1 The World Bank. (n.d.). Project Information Document/ Integrated Safeguards Data Sheet (PID/ISDS)-Sustainable Landscape Program in Jambi. Retrieved from <http://documents1.worldbank.org/curated/en/304221580125294044/pdf/Concept-Project-Information-Documents-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-ID-Jambi-Sustainable-Landscape-Management-Project-J-SLMP-P166672.pdf>
- 2 Unit, B. (n.d.). Main Details. Retrieved October 14, 2020, from <https://www.cbd.int/countries/profile/?country=id>
- 3 Indonesia. (n.d.). Retrieved October 14, 2020, from <http://www.euredd.efi.int/indonesia>
- 4 Vizzuality. (n.d.). Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/%E2%80%A6>
- 5 Roser, H. (n.d.). CO2 emissions. Retrieved October 14, 2020, from <https://ourworldindata.org/co2-emissions>
- 6 Wijaya, A., Juliane, R., Firmansyah, R., Samadhi, T., & Hamzah, H. (2018, September 26). Drivers of Deforestation in Indonesia, Inside and Outside Concessions Areas. Retrieved from <https://www.wri.org/blog/2017/07/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>
- 7 Indonesia: A sign of hope for reducing deforestation? (n.d.). Retrieved from <https://forestdeclaration.org/the-latest/case-study-indonesia>
- 8 Radday, M., Zidowitz, H., Specht, L., Lamp, J., Samson, O., Graf, K., . . . Hokan, M. (2020, July 09). Mehr Wald geht durch Corona verloren. Retrieved from https://blog.wwf.de/wald-corona/?_ga=2.62567916.1331011671.1590674055-1559423464.1590509062
- 9 First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia. (n.d.). Retrieved from https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf
- 10 The Jakarta Post. (n.d.). Indonesia to receive \$56 million from Norway for reducing emissions. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/22/indonesia-to-receive-56-million-from-norway-for-reducing-emissions.html>
- 11 Tackling Deforestation Through a Jurisdictional Approach. (2018, March 07). Retrieved from <https://www.worldwildlife.org/publications/tackling-deforestation-through-a-jurisdictional-approach>
- 12 Tackling Deforestation Through a Jurisdictional Approach. (2018, March 07). Retrieved from <https://www.worldwildlife.org/publications/tackling-deforestation-through-a-jurisdictional-approach>
- 13 UNDP. (n.d.). About Us. Retrieved from <http://foksbi.id/en/about-inpop>
- 14 Introduction to landscape or jurisdictional initiatives in commodity agriculture. (2020, September 09). Retrieved from <https://proforest.net/en/publications/responsible-sourcing-and-production-briefings/introduction-to-landscape-or-jurisdictional-initiatives-in-commodity-agriculture>
- 15 Concept Note Developing Food and Agriculture in RPJMN 2020-2024 with Jurisdictional Approach for Sustainability [Pdf]. (2019).
- 16 Conservation International. (2019, March). Exploring the Reality of the Jurisdictional Approach as a Tool to Achieve Sustainability Commitments in Palm Oil and Soy Supply Chains. Retrieved from https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/jurisdictional_approach_full_report_march2019_published.pdf?Status=Master&sfvrsn=23c977ae_3
- 17 Concept Note Developing Food and Agriculture in RPJMN 2020-2024 with Jurisdictional Approach for Sustainability [Pdf]. (2019).
- 18 Proforest Responsible Sourcing and Production Briefings 02. (n.d.). Introduction to landscape or jurisdictional initiatives in commodity agriculture. Retrieved from https://proforest.net/proforest/en/publications/responsible-sourcing-and-production-briefings/proforest_landscape_approaches_introductionaug2016_web.pdf
- 19 Proforest Responsible Sourcing and Production Briefings 02. (n.d.). Introduction to landscape or jurisdictional initiatives in commodity agriculture. Retrieved from https://proforest.net/proforest/en/publications/responsible-sourcing-and-production-briefings/proforest_landscape_approaches_introductionaug2016_web.pdf
- 20 Tackling Deforestation Through a Jurisdictional Approach. (2018, March 07). Retrieved from <https://www.worldwildlife.org/publications/tackling-deforestation-through-a-jurisdictional-approach>
- 21 Conservation International. (2019, March). Exploring the Reality of the Jurisdictional Approach as a Tool to Achieve Sustainability Commitments in Palm Oil and Soy Supply Chains. Retrieved from https://www.conservation.org/docs/default-source/publication-pdfs/jurisdictional_approach_full_report_march2019_published.pdf?Status=Master&sfvrsn=23c977ae_3
- 22 In Indonesia, a regency or 'kabupaten' is a sub-provincial administrative area led by an appointed regent or 'bupati' who has the authority to regulate and manage their own government affairs. There are 514 regencies in Indonesia (Ministry of Home Affairs, 2020).
- 23 Badan Pusat Statistik. (n.d.). Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, Indonesia (Ribu Ton), 2011-2019*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/dynamic/2015/09/04/839/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-propinsi-dan-jenis-tanaman-indonesia-ribu-ton-2011-2019-.html>
- 24 Vizzuality. (n.d.). Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/%E2%80%A6>
- 25 Indonesia Investments. (n.d.). Palm Oil. Retrieved from <https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/palm-oil/item166>
- 26 Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (n.d.). Produksi Perkebunan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (ton), 2018 dan 2019. Retrieved from <https://riau.bps.go.id/dynamic/2020/04/09/161/produksi-perkebunan-di-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-ton-2018-dan-2019.html>
- 27 Vizzuality. (n.d.). Forest Monitoring, Land Use & Deforestation Trends. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/%E2%80%A6>
- 28 VProforest. (n.d.). Siak Pelalawan Landscape Programme How Companies Collaborate and Engage. Retrieved from <https://proforest.net/proforest/en/publications/plp-briefing-note-3.pdf>
- 29 Indonesia fires emitted double the carbon of Amazon fires, research shows. (2019, November 25). Retrieved from <https://news.mongabay.com/2019/11/indonesia-fires-amazon-carbon-emissions-peatland/>
- 30 Huijnen, V., Wooster, M., Kaiser, J., Gaveau, D., Flemming, J., Parrington, M., . . . Weele, M. (2016, May 31). Fire carbon emissions over maritime southeast Asia in 2015 largest since 1997. Retrieved from <https://www.nature.com/articles/srep26886>
- 31 Badan Restorasi Gambut. (2016). Mengawali Restorasi Gambut Indonesia. Retrieved from https://brg.go.id/files/Publikasi/BRG%202016%20report_29.05.17.pdf
- 32 Proforest. (2020, June). Collaboration for sustainable production landscapes. Retrieved from <https://proforest.net/proforest/en/publications/production-landscapes-programme-impact-report.pdf>
- 33 Saputra, D., & EcoNusantara. (2020, October 15). KPSSH. Retrieved from <https://econusantara.org/kpssh>
- 34 Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak. (2019). Peta Jalan (Roadmap) Siak Kabupaten Hijau [Pdf]. Riau: <http://jikalahari.or.id/kabar/peta-jalan-roadmap-siak-kabupaten-hijau/>.
- 35 Undp. (n.d.). National Action Plan. Retrieved from <http://foksbi.id/en/activities>
- 36 Undp. (n.d.). Public Consultation Pelalawan District Sustainable Palm Oil (DAP-SPO) Action Plan Draft. Retrieved from <http://foksbi.id/en/news/read/10-24-2019-public-consultation-pelalawan-district-37-palm-oil-dap-spo-action-plan-draft>
- 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016. (n.d.). Retrieved from <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175063/PP%20No%2057%20Tahun%202016.pdf>
- 38 Harrison, D. R. and Swinfield, T. 2015. Restoration of logged humid tropical forests: An experimental programme at Harapan Rainforest, Indonesia. Tropical Conservation Science Vol.8 (1): 4-16. Available online: www.tropicalconservation.org
- 39 Indonesia aims for sustainability certification for oil palm smallholders. (2020, April 29). Retrieved from <https://news.mongabay.com/2020/04/indonesia-aims-for-sustainability-certification-for-oil-palm-smallholders/>
- 40 From CDP guidance: A traceability system is a system that tracks by documentation the trail of products and/or raw materials along the value chain
- 41 CDP. (2020). Unlocking Nature's Potential. Retrieved from https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/168/original/Nature-based_Solutions_Policy_Brief.pdf?1589552528#:~:text=It%20is%20aimed%20at%20policy%20makers,C%2C%20deforestation%2Dfree%20world.
- 42 From CDP Forests Guidance: Multi-stakeholder initiative: initiative that is governed by different stakeholder groups, including private sector companies and their associations, civil society organizations (e.g., environmental and social NGOs) and possibly farmer organizations, government organizations and knowledge providers. (Source: SAI Platform, 2015).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

CDP Policy Engagement

Pietro Bertazzi

Global Director, Policy Engagement
pietro.bertazzi@cdp.net

Helen Finlay

Senior Global Policy Manager, Forests
helen.finlay@cdp.net

Nur Maliki Arifiandi

Policy Engagement Manager, Forests
nur.arifiandi@cdp.net

CDP Forests

Morgan Gillespy

Director, Forests
Morgan.gillespy@cdp.net

Rini Setiawati

Manager, Power of Procurement
Project
rini.setiawati@cdp.net

CDP Worldwide

Plantation Place South Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Tel: +44 (0) 20 3818 3900

www.cdp.net

the David &
Lucile Packard
FOUNDATION

Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba global yang mendorong perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi sumber daya air dan juga hutan.

CDP dipilih sebagai penyedia penelitian iklim nomor satu oleh para investor dan bekerja dengan para investor yang mempunyai asset lebih dari USD 106 triliun. Kami memotivasi investor dan pembeli untuk melakukan pengungkapan dan mengelola dampak lingkungan mereka.

Lebih dari 8.400 perusahaan dengan pangsa pasar lebih dari 50%, telah mengungkapkan data-data lingkungan mereka pada tahun 2019 melalui CDP. Jumlah tersebut merupakan tambahan atas lebih dari 920 kota, negara bagian dan wilayah yang melakukan pengungkapan, menjadikan CDP sebagai salah satu sumber informasi terkaya secara global, tentang bagaimana perusahaan dan pemerintah mendorong perubahan lingkungan.

CDP merupakan pendiri *We Mean Business Coalition*.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi <https://cdp.net/en> atau ikuti kami @CDP